

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori dan Konsep

Kerangka Teori dan Konsep sangat diperlukan penulis guna mengkaji permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Teori merupakan sebuah usaha untuk menjelaskan sesuatu atau suatu peristiwa ataupun kegiatan. Teori juga bisa mempunyai arti mempengaruhi tindakan ataupun kebiasaan. Teori juga merupakan sebuah perangkat ide yang mana masuk akal dan konsisten di dalamnya. Perspektif teori merupakan sebuah upaya untuk membangun penjelasan yang mana masuk akal terhadap suatu fenomena tertentu, yang mana menyadarkan diri pada suatu system kepercayaan yang cakupannya lebih luas.⁸

2.1.1 Realisme

Realisme politik sebagai sebuah pemikiran telah hidup jauh sebelum politik itu sendiri terbentuk sebagai suatu disiplin. Kepustakaan politik mencatat dasar-dasar pemikiran realisme telah ada dalam karya-karya penulis besar sejak dari Thucydides (sejarawan), Niccolo Machiavelli (filsuf), hingga Thomas Hobbes (filsuf).⁹ Realisme yang dipaparkan oleh Morgenthau memiliki 6 poin penting yang menjadi dasar-dasar paling fundamental bernegara dalam konstelasi politik global. Poin-poin tersebut diantaranya adalah:

- a) Realisme politik menganggap bahwa politik seperti masyarakat umumnya, dikendalikan oleh hukum-hukum objektif yang berakar pada hakikat manusia.

⁸ Jill Steans dan Llyd Pettiford, Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hal. 14-15.

⁹ Edwin MB Tambunan, Jurnal: " Realisme Politik Morgenthau: Suatu Tinjauan Singkat" (Banten : Universitas Pelita Harapan, 2010), hal 17.

- b) Petunjuk utama yang membantu realisme politik untuk menemukan jalannya melintasi bentangan alam politik internasional ialah konsep kepentingan yang diartikan dalam istilah kekuasaan
- c) Realisme menganggap bahwa konsep utamanya tentang kepentingan yang ditegaskan sebagai kekuasaan merupakan kategori objektif yang berlaku secara universal tetapi tidak memberi sifat pada konsep itu dengan arti yang sudah ditentukan secara definitif.
- d) Realisme politik menyadari pentingnya moral dari tindakan politik. Realisme politik menyadari pula ketegangan yang tidak dapat dihindarkan antara perintah moral dan syarat-syarat dari tindakan politik yang berhasil.
- e) Realisme politik menolak mengidentifikasi cita-cita moral bangsa tertentu dengan hukum-hukum moral yang menguasai alam semesta.
- f) Maka, perbedaan antara realisme politik dengan mazhab pemikiran lain adalah nyata dan menyeluruh. Akan tetapi, banyak dari teori realisme politik mungkin disalahartikan dan disalahkan-tafsirkan, tidak ada yang menyangkal sikap intelektual dan moralnya yang khusus terhadap masalah yang bersifat politik.¹⁰

2.1.2. Konsep Kepentingan Nasional

Dalam hubungan internasional maupun studinya, terdapat elemen yang berkontribusi dalam perkembangannya. Elemen tersebut antara lain adalah *actor*, *interest*, dan *power*. Ketiga hal tersebut berkorelasi dengan satu sama lain dalam

¹⁰ Morgenthau, H.J. (1973). *Politics among Nations: the Struggle for Power and Peace*. 5th edition revised. New York: Alfred A. Knopf. hal. 3-16

membentuk suatu identitas negara. Sebelum sebuah negara dapat mewujudkan suatu identitas, maka setiap elemen tersebut perlu dikembangkan satu persatu.

Dimulai dari aktor, aktor adalah pelaku penggerak terjadinya suatu hubungan diplomasi antar negara. Namun perlu diketahui, setiap tindakan yang dilakukan oleh aktor dilatar belakangi suatu tujuan, dan tujuan tersebut mengarah pada terciptanya kepentingan nasional. Adapun fungsi dari *national interest* itu sendiri adalah sebagai panduan bagi para pemimpin dalam melakukan hubungan luar negeri dan patokan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam melakukan hubungan luar negeri.

Kepentingan nasional merupakan teori / konsep yang sulit untuk diuraikan secara detail mengenai kejelasan motif kepentingan apa dibalik tindakan suatu aktor dalam hubungan internasional, apakah kepentingan ekonomi, politik, atau militer.

Kepentingan nasional atau yang biasa disebut sebagai national interest pertama kali dikemukakan oleh bapak HI Hans J Morgenthau, ia berpendapat bahwa kepentingan nasional merupakan alat untuk mengejar kekuasaan, karena melalui kekuasaan itulah suatu negara dapat mengontrol negara lain. Lebih spesifiknya konsep kepentingan nasional adalah kemampuan negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain.¹¹

2.2 Penelitian terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan tiga penelitian terdahulu yang sangat berguna sebagai rujukan peneliti. Tiga penelitian ini antara lain :

¹¹ Morgenthau, H. J. (1951). In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy. New York: University Press of America.

Tabel 1.

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rionaldo DP	MOTIVASI PEMERINTAH SKOTLANDIA MELAKUKAN REFERENDUM SEBAGAI UPAYA PEMISAHAN DIRI DARI BRITANIA RAYA PADA TAHUN 2014	Menghasilkan kesimpulan yakni upaya pelaksanaan referendum didasarkan oleh berbagai alasan yang sangat fundamental. Salah satunya adalah adanya ketidaksesuaian pandangan antara otoritas Skotlandia dengan Britania Raya dalam pengambilan keputusan.
2.	Sandi Saputra	Referendum Skotlandia terhadap Britania Raya Tahun 2014	Referendum Skotlandia terhadap Britania Raya ialah hasil dari konstruksi identitas yang membentuk kepentingan SNP dalam usaha buat memisahkan Skotlandia dari Britania Raya melalui mekanisme referendum. Tetapi, SNP kandas menggapai kepentingannya dengan hasil cuma 44. 7% yang mendukung SNP dalam

			<p>referendum pada bertepatan pada 14 September 2014.</p> <p>Dengan demikian referendum ini tidaklah kenyataan sosial yang given namun hasil dari konstruksi yang dicoba oleh SNP lewat upaya mengajukan proposal perubahan Scotland Act 1998 ke pemerintah Britania Raya, mengajukan proposal penyelenggaraan referendum ke parlemen Skotlandia, framing issues kemerdekaan Skotlandia serta kampanye. Sikap ini dipengaruhi oleh bukti diri SNP selaku kelompok nasionalis yang tercermin</p> <p>dalam slogan, <i>A Constitution for a Gratis Scotland, Scotland White Paper</i>, manifesto serta Draft <i>Referendum</i></p>
--	--	---	---

			<p><i>Bill Consultation</i> yang dipengaruhi oleh norma <i>self-determination</i>. Tetapi, terlepas dari hasil tersebut SNP lumayan sukses mengubah struktur sosial serta ikatan Skotlandia dengan Britania Raya.</p>
3.	Zulchairi	<p>Kegagalan Skotlandia memisahkan diri dari Inggris melalui referendum 2014</p>	<p>Kegagalan dari independence referendum ini tidak terlepas dari sistem politik yang berlaku di Inggris. Proses pengambilan keputusan dari sistem politik itu turut dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti mulai dari faktor kelembagaan seperti Partai politik serta kelompok kepentingan yang ada di Skotlandia hingga faktor kebijakan yang diterapkan seperti kebijakan perdagangan dan mata uang.</p>

2.3 Kerangka Berpikir

Skotlandia merupakan negara yang tergabung di dalam Britania Raya yang menjadikannya sebagai negara bagian. Meski demikian, skotlandia memiliki kehendak untuk menentukan kebijakan domestik. Setelah adanya keputusan Britania Raya dari Uni Eropa yang memicu terjadinya keinginan referendum gelombang kedua tidak bisa dihindarkan karena mayoritas rakyat Skotlandia menolak untuk keluar dari Uni Eropa. kerangka berpikir yang akan menjadi gambaran dari analisis adalah sebagai berikut.

